



Menilai Akuntabilitas Publik Melalui Audit Berbasis Kinerja: *Systematic Literature Review*

Ummu Habibah^{1*}, Eskasari Putri²

¹⁻²Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

Email: habibahummu@gmail.com¹ ep122@ums.ac.id²

*Penulis Korespondensi: habibahummu@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the development of research on public accountability through performance-based auditing using a Systematic Literature Review (SLR) approach. The review focuses on three main aspects: research trends, dominant themes, and the contribution of performance-based auditing to accountability, public program evaluation, and value for money. The study employed a descriptive qualitative approach guided by the PRISMA 2020 framework. The selection process involved the stages of identification, screening, eligibility assessment, and inclusion, resulting in 15 relevant empirical articles published between 2021 and 2025, excluding review articles. The findings indicate that research on performance-based auditing has increased significantly since 2023, shifting from an administrative compliance orientation toward a stronger emphasis on outcomes, public value, and governance. Five major themes dominate the literature: the development of auditing methodologies, institutional challenges, internal control and fraud prevention, accountability and transparency, and value for money. The review further demonstrates that performance-based auditing plays a crucial role in evaluating the effectiveness of public programs, identifying high-risk areas, strengthening accountability, and promoting more efficient, economical, and effective budget management. Therefore, performance-based auditing can be regarded as a strategic instrument for improving public sector governance and enhancing the quality of public service delivery.*

Keywords: *Performance-Based Auditing; Public Accountability; Public Governance; Systematic Literature Review; Value for Money.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan menganalisis perkembangan kajian Akuntabilitas publik melalui audit berbasis kinerja dengan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR). Fokus kajian diarahkan pada tiga aspek utama yaitu tren penelitian, tema-tema dominan, serta kontribusi audit berbasis kinerja terhadap akuntabilitas, evaluasi program publik dan *value for money*. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan acuan PRISMA 2020. Proses seleksi dilakukan melalui tahap identifikasi, penyaringan, penilaian kelayakan, dan inklusi, hingga diperoleh 15 artikel empiris terbitan 2021–2025 yang relevan dan bukan artikel review. Hasil kajian menunjukkan bahwa riset audit berbasis kinerja mengalami peningkatan setelah 2023 dan bergerak dari orientasi kepatuhan administratif menuju orientasi hasil, nilai publik, serta tata kelola. Lima tema utama yang mendominasi literatur meliputi perkembangan metodologi audit, tantangan kelembagaan, kontrol internal dan pencegahan fraud, akuntabilitas dan transparansi, serta *value for money*. Kajian ini juga menegaskan bahwa audit berbasis kinerja berperan penting dalam menilai efektivitas program publik, mengidentifikasi area berisiko, memperkuat akuntabilitas dan mendorong pengelolaan anggaran yang lebih efisien, ekonomis, dan efektif. Dengan demikian, audit berbasis kinerja dapat dipahami sebagai instrumen strategis untuk memperbaiki tata kelola sektor publik dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Kata kunci: Akuntabilitas Publik; Audit Berbasis Kinerja; Tata Kelola Publik; Tinjauan Literatur Sistematis; Value for Money.

1. LATAR BELAKANG

Tuntutan terhadap tata kelola sektor publik terus bergerak ke arah yang lebih substantif. Lembaga publik tidak lagi dinilai semata-mata dari kepatuhan administratif, melainkan dari kapasitasnya menghasilkan layanan yang efektif, penggunaan anggaran yang efisien, serta manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam lingkungan seperti ini, akuntabilitas tidak cukup dimaknai sebagai kewajiban menyampaikan laporan, tetapi juga sebagai kemampuan organisasi publik mempertanggungjawabkan pilihan kebijakan, pelaksanaan program, dan

hasil yang dicapai (Rodiah et al., 2024). Beberapa studi telah menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi tetap menjadi isu sentral dalam akuntansi serta pengawasan sektor publik karena keduanya berkaitan langsung dengan legitimasi institusi dan kepercayaan publik (Sari & Muslim, 2023). Transparansi merujuk pada keterbukaan informasi dan proses pengambilan keputusan yang memungkinkan pemangku kepentingan untuk melihat dan memahami bagaimana organisasi beroperasi dan membuat keputusan (Anas, 2023). Di sisi lain, akuntabilitas mengacu pada tanggung jawab yang harus dipikul oleh individu atau organisasi untuk tindakan dan keputusan perusahaan serta kewajiban untuk melaporkan, menjelaskan, dan mempertanggungjawabkan hasil kinerja perusahaan kepada pemangku kepentingan (Hatta, 2022). Dalam sektor publik, transparansi dan akuntabilitas penting untuk mencegah korupsi, memastikan penggunaan dana publik yang efisien, dan membangun kepercayaan masyarakat (Manurung & Anggraeni, 2023). Perspektif tersebut menjelaskan mengapa audit di sektor publik perlu berkembang dari orientasi tradisional menuju pendekatan yang lebih evaluatif dan bernilai strategis (Arwani & Priyadi, 2024).

Salah satu pendekatan yang paling relevan dalam konteks tersebut adalah audit berbasis kinerja. Audit ini menilai sejauh mana program, kegiatan, atau entitas publik dikelola secara ekonomis, efisien, dan efektif. Fokusnya bukan hanya apakah prosedur telah diikuti, tetapi juga apakah sumber daya publik telah digunakan dengan layak untuk mencapai sasaran yang direncanakan. Studi pada lingkup internasional memperlihatkan bahwa audit kinerja telah menempati posisi penting dalam perkembangan riset audit sektor publik karena dianggap mampu menjembatani kebutuhan pengawasan dengan agenda peningkatan kinerja organisasi publik (Rana et al., 2022). Arah serupa juga terlihat dalam ulasan yang lebih luas tentang riset audit sektor publik, yang menunjukkan pergeseran perhatian dari audit keuangan dan kepatuhan menuju audit yang menekankan hasil, nilai publik, dan perbaikan manajerial (Mattei et al., 2021; Nur et al., 2024).

Relevansi audit berbasis kinerja makin kuat ketika dikaitkan dengan konsep *value for money*. Melalui sudut pandang ini, audit tidak hanya berperan sebagai instrumen kontrol, tetapi juga sebagai sarana untuk menilai apakah belanja publik menghasilkan manfaat yang sepadan dengan biaya yang dikeluarkan. Nilai audit kinerja bagi sektor publik terletak pada kemampuannya menilai rasionalitas program, kualitas implementasi, serta kontribusi kebijakan terhadap kebutuhan publik (Bejo et al., 2022). Gagasan tersebut sejalan dengan diskusi mengenai masa depan audit publik yang menempatkan akuntabilitas, kepentingan publik, dan penciptaan nilai sebagai orientasi utama pengawasan modern (Ferry et al., 2022). Dalam konteks Indonesia, keterkaitan antara transparansi, akuntabilitas, dan *value for money* juga

telah diperlihatkan dalam riset pengelolaan keuangan sektor publik, sehingga audit berbasis kinerja memiliki landasan konseptual yang kuat untuk digunakan sebagai alat evaluasi yang lebih komprehensif (Wonar et al., 2024).

Meski demikian, penerapan audit berbasis kinerja tidak terlepas dari berbagai tantangan. Audit kinerja menuntut auditor untuk memiliki kapasitas analitis yang memadai, independensi yang terjaga, serta kemampuan memahami risiko dan konteks kebijakan publik. Ketika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, kualitas audit dan daya guna rekomendasi dapat menurun (Suwari et al., 2022). Kajian tentang efektivitas audit internal menunjukkan bahwa kompetensi, independensi, dukungan manajemen, kualitas komunikasi, serta sumber daya organisasi merupakan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan fungsi audit (Abdelrahim & Al-Malkawi, 2022). Dalam ranah sektor publik, persoalan tersebut menjadi lebih kompleks karena auditor sering berhadapan dengan tekanan politik, kepentingan kelembagaan, dan keterbatasan data. Studi kasus Indonesia bahkan menunjukkan bahwa audit sektor publik dapat dipengaruhi oleh hegemoni politik yang pada akhirnya berimplikasi terhadap independensi auditor dan kualitas proses audit itu sendiri (Sumiyana et al., 2023).

Perkembangan lingkungan pemerintahan juga membuat audit kinerja menghadapi ruang lingkup yang makin luas. Audit publik saat ini bergerak melampaui batas-batas tradisional dan mulai bersentuhan dengan isu tata kelola kolaboratif, keberlanjutan, risiko lintas sektor, serta pengukuran nilai publik yang lebih kompleks (Grossi et al., 2023). Di tingkat supranasional, perubahan logika kelembagaan bahkan mendorong lembaga audit untuk memberi perhatian lebih besar terhadap aspek nonkeuangan dan dimensi publik yang lebih strategis (Grossi et al., 2023). Perubahan tersebut diperkuat oleh transformasi digital. Teknologi membuka peluang peningkatan kualitas analisis, jangkauan pemeriksaan, dan kecepatan pemrosesan data, tetapi juga memunculkan kekhawatiran baru terkait kapasitas organisasi, etika, serta reliabilitas sistem digital dalam proses audit (Volodina & Grossi, 2025). Konsekuensinya, kajian tentang audit berbasis kinerja menjadi semakin beragam dan tersebar dalam banyak subtopik.

Dalam konteks Indonesia, kajian audit sektor publik terus berkembang, namun belum sepenuhnya terkonsolidasi. Tinjauan sistematis terhadap audit sektor publik di Indonesia menunjukkan bahwa bidang ini masih relatif berkembang dan tersebar dalam sejumlah fokus seperti kualitas audit, opini dan temuan audit, fraud, transparansi, serta akuntabilitas (Istianah et al., 2024). Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk menyusun pemetaan yang lebih terarah, khususnya terhadap audit berbasis kinerja sebagai pendekatan yang langsung berhubungan dengan evaluasi program publik. Kebutuhan ini juga relevan karena lembaga

audit tertinggi memiliki kontribusi penting dalam mendorong tata kelola pemerintahan dan pencapaian tujuan pembangunan, termasuk agenda kesejahteraan yang lebih luas (Awalia et al., 2024). Hal ini menandakan bahwa audit kinerja bukan sekadar isu teknis pemeriksaan, melainkan berkaitan dengan efektivitas kebijakan publik dan kualitas pengambilan keputusan.

Melalui uraian tersebut, masih terlihat ruang akademik yang perlu diisi. Riset terdahulu memang telah membahas audit sektor publik, akuntabilitas, transparansi, kualitas audit, hingga *value for money*. Namun, literatur yang secara khusus menghimpun, mengelompokkan, dan menafsirkan perkembangan penelitian audit berbasis kinerja dalam sektor publik masih terbatas, terutama yang menghubungkan tiga dimensi penting sekaligus, yaitu identifikasi risiko, evaluasi program publik, dan penciptaan *value for money*. Di titik inilah tinjauan literatur sistematis menjadi penting. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menelaah karya-karya terdahulu secara terstruktur, menyaring artikel yang relevan, lalu menyusun sintesis yang lebih kokoh mengenai arah kajian, tema dominan, serta kontribusi substantif audit berbasis kinerja. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara sistematis perkembangan literatur mengenai audit berbasis kinerja pada sektor publik agar diperoleh gambaran yang lebih utuh tentang posisi kajian ini dalam diskursus akuntabilitas dan tata kelola publik.

Berdasarkan tujuan tersebut, penelitian ini dirumuskan ke dalam tiga pertanyaan penelitian.

RQ1: Bagaimana perkembangan tren penelitian mengenai audit berbasis kinerja pada sektor publik?

RQ2: Apa saja tema-tema utama yang dibahas dalam penelitian audit berbasis kinerja pada sektor publik?

RQ3: Bagaimana penelitian terdahulu menjelaskan peran audit berbasis kinerja dalam meningkatkan akuntabilitas, evaluasi program publik, dan *value for money*?

2. KAJIAN TEORITIS

Akuntabilitas dan Tata Kelola Publik

Akuntabilitas dan tata kelola publik merupakan tujuan normatif sekaligus praktis dari audit sektor publik. Audit tidak berhenti pada identifikasi kelemahan, melainkan diharapkan mendorong transparansi, memperkuat kepercayaan publik, dan memperbaiki kualitas institusi. Penelitian mutakhir di Indonesia memperlihatkan bahwa akuntabilitas dan transparansi berhubungan dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Studi lain menegaskan bahwa audit dan pengendalian intern yang baik dapat menekan korupsi serta

memperkuat prinsip *good governance* di pemerintah daerah. Dari sudut yang lebih luas, audit memberi nilai tambah ketika rekomendasinya mampu diterjemahkan menjadi perbaikan kebijakan, peningkatan layanan, dan tata kelola yang lebih bertanggung jawab. Dengan demikian, audit berbasis kinerja dapat dipahami sebagai instrumen yang tidak hanya memeriksa, tetapi juga mendorong perubahan organisasi ke arah pengelolaan publik yang lebih akuntabel dan berorientasi hasil (Pratolo et al., 2022; Ritonga, 2024; Shidqi & Arfiansyah, 2025).

Audit Sektor Publik

Audit sektor publik merupakan mekanisme pengawasan yang dirancang untuk menilai apakah pengelolaan sumber daya negara berlangsung sesuai mandat kelembagaan, prinsip tata kelola, dan kepentingan masyarakat. Berbeda dari audit di sektor privat yang lebih berorientasi pada kepentingan pemilik modal, audit sektor publik melekat pada tuntutan akuntabilitas, legitimasi, serta pelayanan publik. Studi yang belakangan muncul, menunjukkan bahwa penguatan audit publik tidak hanya bergantung pada prosedur formal, melainkan juga pada kapasitas kelembagaan, efektivitas komite audit, serta dukungan sistem pengendalian intern. Dalam konteks ini, audit berfungsi sebagai instrumen pengawasan yang menghubungkan penggunaan anggaran dengan kewajiban pertanggungjawaban kepada publik. Kualitas pengawasan juga meningkat ketika audit mampu memberi umpan balik yang relevan bagi perbaikan manajemen dan pengambilan keputusan di lingkungan pemerintahan (Ramadhan & Gani, 2023; Bonsu et al., 2023).

Audit Berbasis Kinerja

Audit berbasis kinerja berkembang sebagai respons atas keterbatasan audit keuangan dan audit kepatuhan yang belum sepenuhnya menjelaskan mutu hasil program publik. Pendekatan ini menilai apakah kegiatan pemerintah telah dilaksanakan secara ekonomis, efisien, dan efektif, sekaligus menguji relevansi antara tujuan program dan hasil yang dicapai. Dalam praktiknya, audit berbasis kinerja menuntut auditor untuk memiliki keterampilan analitis, pemahaman atas desain program, serta kemampuan menilai indikator hasil secara lebih mendalam. Kajian di Indonesia memperlihatkan bahwa metodologi audit kinerja terus mengalami perkembangan dan menuntut penyempurnaan agar dapat menjawab kompleksitas sektor publik modern. Diskusi internasional juga menunjukkan bahwa audit kinerja menghadapi tantangan dalam penentuan kriteria, pengukuran hasil, serta penyusunan rekomendasi yang benar-benar dapat diimplementasikan oleh entitas yang diaudit (Andrianto et al., 2021; Caranica & Domnisor, 2022).

Value for Money dalam Sektor Publik

Konsep *value for money* menekankan bahwa belanja publik harus menghasilkan manfaat yang sepadan melalui penggunaan sumber daya yang hemat, efisien, dan tepat sasaran. Karena itu, konsep ini sangat erat dengan audit berbasis kinerja, sebab keduanya sama-sama menilai kualitas penggunaan anggaran dari sisi hasil, bukan sekadar kepatuhan administratif. Riset empiris di pemerintah daerah Indonesia menunjukkan bahwa akuntabilitas keuangan publik dan pengendalian internal berkontribusi terhadap peningkatan capaian *value for money*. Bukti lain memperlihatkan bahwa praktik manajerial yang kuat, khususnya dalam pengadaan publik, turut menentukan terciptanya nilai atas uang yang dibelanjakan oleh organisasi sektor publik. Selain itu, kajian yang lebih baru juga menegaskan bahwa penerapan konsep *value for money* berhubungan positif dengan performa anggaran, sehingga konsep ini layak diposisikan sebagai salah satu fondasi evaluasi kinerja sektor publik (Jatmiko et al., 2022; Waci et al., 2024; Said et al., 2025).

Evaluasi Program Publik dan Identifikasi Risiko

Evaluasi program publik dan identifikasi risiko merupakan dua komponen yang saling terkait dalam audit berbasis kinerja. Evaluasi program membantu auditor menilai apakah tujuan kebijakan telah tercapai, sedangkan identifikasi risiko memungkinkan auditor memusatkan perhatian pada area yang paling rentan menimbulkan inefisiensi, penyimpangan, atau kegagalan pencapaian sasaran. Riset saat ini memperlihatkan bahwa audit internal memiliki peran penting dalam penguatan pencegahan fraud, peningkatan pengendalian, serta pembenahan tata kelola pengadaan publik. Kajian lain menegaskan bahwa kualitas audit internal dan efektivitas mekanisme pengendalian berkontribusi terhadap berkurangnya ruang penyimpangan dalam organisasi pemerintah. Perspektif ini menunjukkan bahwa audit berbasis kinerja tidak dapat dipisahkan dari logika manajemen risiko, sebab keberhasilan evaluasi program sangat ditentukan oleh kemampuan auditor membaca titik lemah kebijakan, proses, dan implementasi layanan publik (Nadirsyah et al., 2024; Yanuarisa et al., 2025; Boufounou et al., 2024).

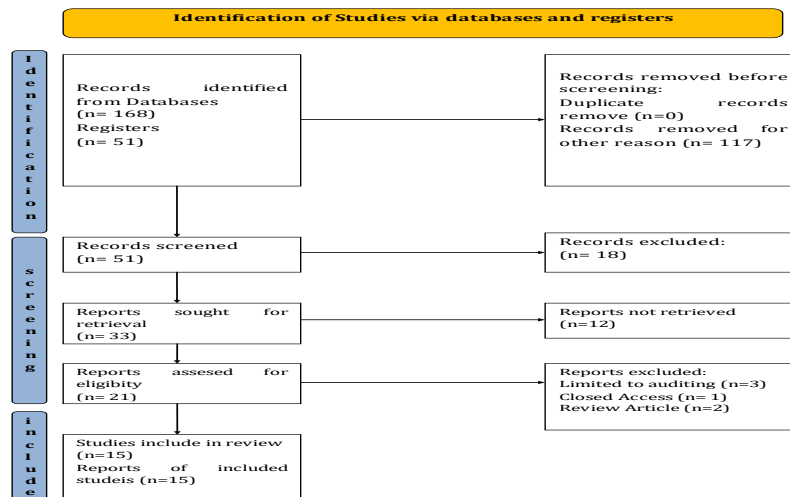
3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode *Systematic Literature Review* (SLR) untuk menelaah perkembangan kajian mengenai audit berbasis kinerja di sektor publik. Pilihan metode ini didasarkan pada kebutuhan untuk menghimpun, menyeleksi, mengevaluasi, dan mensintesis artikel-artikel ilmiah yang relevan secara terstruktur agar jawaban atas rumusan masalah dapat dibangun dari dasar literatur yang jelas.

Rancangan kajian mengikuti prinsip pelaporan PRISMA 2020, khususnya dalam transparansi proses penelusuran, seleksi, kelayakan, dan inklusi artikel, sehingga setiap tahap dapat dijelaskan secara terbuka dan dapat ditelusuri ulang oleh pembaca.

Sumber data penelitian berasal dari artikel jurnal ilmiah yang diperoleh melalui penelusuran beberapa basis data dan register yang menyediakan publikasi nasional maupun internasional. Penelusuran dilakukan dengan memadukan kata kunci berbahasa Indonesia dan Inggris, seperti *audit berbasis kinerja*, *performance audit*, *public sector audit*, *value for money*, *public program evaluation*, dan *risk-based audit*. Kombinasi kata kunci tersebut digunakan untuk menjangkau artikel yang membahas audit sektor publik dari sisi konsep, penerapan, evaluasi program, risiko, serta kontribusinya terhadap akuntabilitas. Artikel yang dipertimbangkan ialah publikasi terbitan 2020–2026, tersedia dalam naskah penuh, ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris, dan memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian.

Proses seleksi dilakukan melalui empat tahap, yaitu identifikasi, screening, penilaian kelayakan, dan inklusi. Tahap identifikasi menghasilkan 168 artikel dari database dan 51 artikel dari registers, sehingga jumlah awal yang terhimpun mencapai 219 artikel. Sesudah itu dilakukan pembersihan awal, dan tidak ditemukan artikel duplikat. Sejumlah 117 artikel dikeluarkan sebelum screening karena tidak sesuai dengan topik, jenis publikasi, atau ruang lingkup penelitian. Tahap berikutnya menyisakan 51 artikel untuk screening judul dan abstrak. Dari jumlah tersebut, 18 artikel dieliminasi karena relevansinya tidak memadai dengan fokus audit berbasis kinerja dalam sektor publik. Selanjutnya, 33 artikel masuk ke tahap penelusuran naskah penuh, namun 12 artikel tidak berhasil diperoleh dalam bentuk lengkap. Dengan demikian, 21 artikel dapat dinilai kelayakannya secara penuh. Setelah pembacaan mendalam, 6 artikel kembali dikeluarkan yang terdiri atas 3 artikel terbatas pada auditing umum, 1 artikel akses tertutup, dan 2 artikel review. Tahap akhir menghasilkan 15 artikel yang layak dianalisis dalam kajian ini.



Gambar 1. Alur seleksi artikel dalam *systematic literature review*.

Artikel yang lolos seleksi kemudian diekstraksi ke dalam matriks analisis yang memuat nama penulis, tahun terbit, negara atau konteks studi, tujuan penelitian, metode yang digunakan, fokus pembahasan, serta hasil utama yang berkaitan dengan audit berbasis kinerja. Langkah ini diperlukan agar data dari tiap artikel dapat dibandingkan secara sistematis. Sintesis dilakukan secara naratif karena penelitian ini tidak bertujuan menghitung ukuran efek statistik atau melakukan meta-analisis. Narasi sintesis dipakai untuk mengelompokkan artikel ke dalam tema-tema utama, seperti perkembangan kajian audit berbasis kinerja, hubungan audit dengan evaluasi program publik, peran identifikasi risiko, serta kontribusi audit terhadap akuntabilitas dan *value for money*. Pendekatan semacam ini dinilai tepat ketika kajian berhadapan dengan variasi desain penelitian, konteks kelembagaan, dan bentuk keluaran studi yang tidak seragam, sehingga integrasi makna lebih relevan daripada agregasi statistik (Campbell et al., 2020).

Untuk menjaga kredibilitas kajian, penelitian ini menerapkan kriteria inklusi dan eksklusi yang jelas, menelusuri artikel secara sistematis, serta menggunakan proses seleksi bertahap yang terdokumentasi. Selain itu, analisis dibangun dengan mengaitkan setiap artikel terhadap tiga pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan, sehingga sintesis tidak melebar dari fokus utama kajian. Melalui prosedur tersebut, metode SLR dalam penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan gambaran yang lebih utuh mengenai arah perkembangan riset audit berbasis kinerja di sektor publik beserta kontribusinya terhadap evaluasi program, penguatan akuntabilitas, dan penciptaan *value for money*.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Seleksi Artikel

Berdasarkan proses seleksi yang telah dijelaskan pada bagian metode, kajian ini menggunakan 15 artikel empiris terbitan 2021–2025. Seluruh artikel dipilih karena relevan dengan audit berbasis kinerja di sektor publik dan tidak termasuk artikel *systematic literature review* maupun *review article*. Korpus ini cukup memadai untuk menjawab tiga pertanyaan penelitian, sebab artikel-artikel tersebut mencakup konteks Indonesia, Afrika Sub-Sahara, Yunani, Kenya, Rumania, Norwegia, serta studi lintas negara mengenai lembaga audit tertinggi. Ragam konteks tersebut memberi ruang untuk membaca perkembangan topik, variasi tema, serta kontribusi audit berbasis kinerja terhadap akuntabilitas, evaluasi program, dan *value for money* (Andrianto et al., 2021; Awalia et al., 2024; Volodina & Grossi, 2025).

Karakteristik Umum Artikel Terpilih

Karakteristik artikel menunjukkan dua kecenderungan utama. Pertama, mayoritas publikasi menggunakan pendekatan kuantitatif, terutama survei, SEM, regresi panel, dan PLS. Kedua, sebagian artikel memakai studi kasus kualitatif untuk menggali persoalan independensi auditor, transformasi digital, dan perkembangan metodologi audit. Komposisi ini menandakan bahwa riset audit berbasis kinerja tidak lagi hanya bersifat normatif, tetapi juga bergerak ke pengujian hubungan antarfaktor yang memengaruhi tata kelola sektor publik. Dominasi konteks Indonesia juga terlihat cukup kuat, meskipun artikel dari negara lain memberi pembandingan penting mengenai tantangan implementasi audit kinerja di lingkungan kelembagaan yang berbeda (Bonsu et al., 2023; Caranica & Domnisor, 2022; Nadirsyah et al., 2024).

Tabel 1. Profil ringkas 15 artikel terpilih.

No.	Artikel	Konteks	Metode	Fokus utama
1	Andrianto et al. (2021)	Indonesia	Studi kasus	Perkembangan metodologi audit kinerja
2	Awalia et al. (2024)	Lintas negara	Kuantitatif	Oversight SAI dan governance
3	Bonsu et al. (2023)	Afrika Sub-Sahara	SEM	Integritas, kepemimpinan, akuntabilitas
4	Boufounou et al. (2024)	Yunani	Analisis kelembagaan	Kontrol internal dan mitigasi korupsi
5	Caranica & Domnisor (2022)	Rumania	Kualitatif-kuantitatif	Tantangan audit kinerja
6	Grossi et al. (2023)	Lintas konteks	Reflektif-konseptual	Perluasan batas audit sektor publik
7	Jatmiko et al. (2022)	Indonesia	Survei PLS	Akuntabilitas, kontrol internal, <i>value for money</i>
8	Nadirsyah et al. (2024)	Indonesia	Survei	Audit internal, fraud prevention, governance

9	Pratolo et al. (2022)	Indonesia	Survei	Akuntabilitas, transparansi, kepercayaan publik
10	Said et al. (2025)	Indonesia	Survei	<i>Value for money</i> dan kinerja anggaran
11	Shidqi & Arfiansyah (2025)	Indonesia	Regresi panel	Audit, kontrol internal, korupsi
12	Sumiyana et al. (2023)	Indonesia	Studi kasus	Hegemoni politik dan kualitas audit
13	Volodina & Grossi (2025)	Norwegia	Studi kasus	Transformasi digital audit publik
14	Waci et al. (2024)	Kenya	Kuantitatif	Pengadaan dan <i>value for money</i>
15	Wonar et al. (2024)	Indonesia	Asosiatif	Transparansi, akuntabilitas, <i>value for money</i>

Tabel 1 memperlihatkan bahwa artikel terpilih tidak hanya membahas audit kinerja dalam arti sempit, melainkan juga isu-isu yang menopang keberhasilan audit, seperti integritas, kontrol internal, kualitas tata kelola, dan kinerja anggaran. Dengan demikian, korpus ini cukup kuat untuk menjelaskan arah penelitian sekaligus konsekuensi praktis audit berbasis kinerja.

Tren Penelitian Audit Berbasis Kinerja pada Sektor Publik

Dilihat dari tahun terbit, publikasi meningkat setelah 2023. Dari 15 artikel, satu artikel terbit pada 2021, tiga artikel pada 2022, tiga artikel pada 2023, lima artikel pada 2024, dan tiga artikel pada 2025. Arah ini menunjukkan bahwa audit berbasis kinerja dan isu turunannya semakin mendapat perhatian, khususnya ketika dikaitkan dengan digitalisasi, pengelolaan risiko, akuntabilitas, dan pengendalian korupsi. Tren ini juga menunjukkan pergeseran fokus dari audit sebagai kepatuhan administratif menuju audit sebagai instrumen tata kelola yang berorientasi hasil (Grossi et al., 2023; Volodina & Grossi, 2025).

Tabel 2. Tema utama hasil sintesis.

Tema	Jumlah artikel	Artikel kunci	Keterkaitan dengan RQ
Perkembangan metodologi dan batas audit	4	(Andrianto et al. 2021; Grossi et al. 2023; Volodina & Grossi, 2025; Caranica & Domnisor, 2022)	RQ1, RQ2
Independensi, politik, dan tantangan kelembagaan	3	(Sumiyana et al. 2023; Caranica & Domnisor, 2022; Boufounou et al. 2024)	RQ2, RQ3
Kontrol internal, fraud prevention, dan korupsi	4	(Nadirisyah et al. 2024; Boufounou et al. 2024; Shidqi & Arfiansyah; Bonsu et al. 2023)	RQ2, RQ3
Akuntabilitas, transparansi, dan kepercayaan publik	4	(Bonsu et al. 2023; Pratolo et al. 2022; Awalia et al. 2024; Wonar et al. 2024)	RQ2, RQ3
<i>Value for money</i> dan kinerja anggaran/program	5	(Jatmiko et al. 2022; Waci et al. 2024; Said et al. 2025; Wonar et al. 2024; Awalia et al. 2024)	RQ2, RQ3

Tabel 2 menegaskan bahwa tema yang paling menonjol adalah *value for money*, kontrol internal, dan akuntabilitas publik. Isu evaluasi program hadir terutama melalui pembahasan efektivitas penggunaan anggaran, pengawasan SAI, dan kualitas keputusan pengelolaan publik.

Tema Utama dalam Penelitian Audit Berbasis Kinerja

Hasil sintesis memperlihatkan bahwa penelitian audit berbasis kinerja bergerak dalam lima tema besar. Tema pertama berkaitan dengan perkembangan metodologi audit dan perluasan ruang lingkup audit publik. Tema kedua menyoroti tantangan implementasi, terutama independensi auditor, intervensi politik, dan keterbatasan kelembagaan. Tema ketiga berfokus pada kontrol internal, pencegahan fraud, dan pengurangan korupsi. Tema keempat menempatkan audit sebagai pendorong akuntabilitas, transparansi, dan kepercayaan publik. Tema kelima menekankan hubungan audit dengan efisiensi, efektivitas, dan *value for money* dalam pengelolaan anggaran dan program publik (Sumiyana et al., 2023; Nadirsyah et al., 2024; Pratolo et al., 2022; Waci et al., 2024). Dari 15 artikel, dapat diringkas bahwa audit berbasis kinerja dipahami bukan hanya sebagai teknik pemeriksaan, melainkan sebagai instrumen yang menghubungkan pengawasan, evaluasi, akuntabilitas, dan penciptaan nilai publik. Kajian terpilih juga memperlihatkan bahwa keberhasilan audit kinerja bergantung pada kualitas metodologi, independensi auditor, kematangan kontrol internal, serta kemampuan lembaga publik menerjemahkan rekomendasi audit ke dalam perbaikan manajerial dan kebijakan. Landasan inilah yang kemudian menjadi titik masuk utama untuk pembahasan lebih mendalam pada bab berikutnya.

Interpretasi Tren Penelitian Audit Berbasis Kinerja pada Sektor Publik

Temuan pada hasil penelitian menunjukkan bahwa riset audit berbasis kinerja mengalami penguatan setelah 2023. Kenaikan ini tidak bisa dibaca hanya sebagai penambahan jumlah publikasi, namun juga memunculkan perubahan orientasi yang jelas: audit sektor publik kini lebih sering dibahas dalam hubungannya dengan *public value*, transformasi digital, pencegahan korupsi, dan peningkatan kualitas tata kelola. Artikel Grossi et al. (2023) memperlihatkan bahwa batas audit sektor publik sedang bergeser ke wilayah yang sebelumnya jarang dibahas, seperti audit pembangunan berkelanjutan dan audit terdigitalisasi. Volodina dan Grossi (2025) bahkan menunjukkan bahwa digitalisasi memunculkan harapan baru bagi akuntabilitas, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran terkait kapasitas manusia dan konsekuensi etis. Ini berarti RQ1 terjawab dengan cukup tegas: tren penelitian bergerak dari audit yang berfokus pada kepatuhan menuju audit yang mengejar nilai publik dan hasil kebijakan.

Kecenderungan tersebut juga selaras dengan studi Andrianto et al. (2021) yang membahas perkembangan metodologi audit kinerja di BPK. Artikel ini menunjukkan bahwa reformasi audit tidak berhenti pada adopsi istilah atau standar, tetapi menuntut kematangan metodologi, pemilihan kriteria audit, dan adaptasi institusional yang berkelanjutan. Dengan kata lain, tren peningkatan publikasi tidak berdiri sendiri, tetapi tumbuh bersamaan dengan meningkatnya kebutuhan praktis lembaga publik untuk mengevaluasi program secara lebih tajam.

Analisis Tema-Tema Dominan dalam Literatur

Tema utama yang dominan dalam penelitian audit berbasis kinerja dengan sintesis 15 artikel menunjukkan setidaknya lima tema kunci: perkembangan metodologi audit, tantangan kelembagaan, pengendalian internal, akuntabilitas publik, dan *value for money*. Tema-tema ini saling berhubungan. Perkembangan metodologi menentukan kualitas pemeriksaan; tantangan kelembagaan memengaruhi independensi auditor; kontrol internal memengaruhi kemampuan organisasi merespons risiko; akuntabilitas memperjelas arah pertanggungjawaban; dan *value for money* menjadi ukuran hasil yang paling dekat dengan semangat audit kinerja.

Caranica dan Domnisor (2022) memperlihatkan bahwa audit kinerja menghadapi tantangan dalam penetapan kriteria, perbandingan dengan audit lain, dan penyesuaian dengan standar INTOSAI. Temuan ini penting karena memperlihatkan bahwa audit kinerja sering kali lebih sulit dijalankan dibanding audit keuangan. Kesulitan tersebut muncul karena auditor harus menilai efektivitas, efisiensi, dan ekonomi, bukan sekadar kepatuhan dokumen. Di sisi lain, Sumiyana et al. (2023) menambahkan dimensi yang lebih kritis: kualitas audit dapat menurun ketika independensi auditor tertekan oleh hegemoni politik. Dua artikel ini bersama-sama menegaskan bahwa mutu audit kinerja tidak hanya ditentukan oleh teknik, tetapi juga oleh struktur kekuasaan yang melingkupinya.

Tema berikutnya adalah kontrol internal dan pencegahan fraud. Nadirsyah et al. (2024) menunjukkan bahwa fungsi audit internal, kontrol internal, dan pencegahan fraud berpengaruh terhadap tata kelola, termasuk melalui hubungan mediasi antara kontrol dan pencegahan fraud. Temuan serupa hadir dalam studi Boufounou et al. (2024) serta Shidqi & Arfiansyah (2025), yang menekankan bahwa penguatan mekanisme kontrol internal dan fungsi audit internal berkaitan dengan berkurangnya ruang korupsi dan meningkatnya kapasitas tata kelola. Tema ini menempati posisi penting dalam literatur karena audit berbasis kinerja tidak dapat bekerja optimal jika organisasi yang diaudit belum memiliki kontrol dasar yang memadai.

Peran Audit Berbasis Kinerja terhadap Evaluasi Program Publik

Dalam korpus artikel terpilih, evaluasi program publik tampak melalui tiga jalur. Pertama, audit kinerja digunakan untuk menilai apakah metodologi pemeriksaan mampu membaca keberhasilan program secara lebih tepat, sebagaimana diulas Andrianto et al. (2021). Kedua, audit berfungsi sebagai alat untuk menilai pengaruh pengawasan lembaga audit terhadap capaian kebijakan publik, seperti pada studi Awalia et al. (2024) tentang *oversight* SAI dan pencapaian SDG 1. Ketiga, audit menjadi sarana untuk menguji apakah belanja dan proses pengadaan menghasilkan manfaat yang setara dengan sumber daya yang digunakan, seperti terlihat dalam studi Waci et al. (2024) dan Said et al. (2025).

Penelitian Awalia et al. (2024) memberikan dampak yang krusial, karena memperluas makna evaluasi program dari level organisasi menuju hasil pembangunan. Hal ini berarti, audit tidak lagi terbatas pada pemeriksaan unit kerja, melainkan ikut terkait dengan evaluasi kebijakan yang menyentuh tujuan pembangunan. Perspektif ini menjelaskan mengapa audit berbasis kinerja relevan untuk sektor publik: ia membantu menilai hubungan antara input, proses, output, dan dampak. Dengan demikian, evaluasi program publik dalam literatur ini cenderung dipahami sebagai evaluasi kebermanfaatan kebijakan, bukan sekadar evaluasi serapan anggaran.

Peran Audit Berbasis Kinerja terhadap Identifikasi Risiko dan Perbaikan Pengelolaan Publik

Literatur yang terpilih juga menunjukkan bahwa audit berbasis kinerja berjalan efektif ketika dipadukan dengan logika identifikasi risiko. Meskipun tidak semua artikel menggunakan istilah “risk-based audit” secara eksplisit, substansi risikonya hadir kuat dalam pembahasan mengenai korupsi, fraud, kelemahan kontrol, dan intervensi politik. Sumiyana et al. (2023) memperlihatkan risiko yang bersumber dari kekuasaan politik. Boufounou et al. (2024) dan Shidqi dan Arfiansyah (2025) menyoroti risiko yang melekat pada lemahnya kontrol internal. Nadirsyah et al. (2024) menunjukkan bahwa pencegahan *fraud* dan penguatan kontrol internal dapat memperkuat tata kelola. Dari sini terlihat bahwa identifikasi risiko dalam audit berbasis kinerja bukan hanya tahap teknis, melainkan cara untuk memprioritaskan area yang paling rawan terhadap pemborosan, penyimpangan, dan kegagalan program.

Implikasinya terhadap pengelolaan publik cukup jelas. Audit yang mampu mengidentifikasi risiko secara tepat memberi sinyal bagi manajemen untuk memperbaiki prosedur, meningkatkan pengawasan internal, dan memfokuskan sumber daya pada area yang paling membutuhkan pembenahan. Dalam konteks ini, audit berbasis kinerja berperan sebagai

mekanisme umpan balik manajerial. bukan hanya menilai masa lalu, tetapi juga mengarahkan perbaikan kelembagaan kedepan.

Peran Audit Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas dan *Value for Money*

Hubungan audit berbasis kinerja dengan akuntabilitas tampak paling konsisten dalam literatur Bonsu et al. (2023) yang menyatakan bahwa integritas, kontrol internal, dan kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas publik. Pratolo et al. (2022) menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi berkaitan dengan meningkatnya kepercayaan publik. Wonar et al. (2024) menambahkan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan konsep *value for money* berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan sektor publik. Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa audit kinerja memperoleh makna penuh ketika hasilnya bermuara pada perbaikan pertanggungjawaban kepada publik.

Aspek *value for money* juga menempati posisi sentral dalam hal ini. Studi yang dilakukan Jatmiko et al. (2022) menunjukkan bahwa akuntabilitas keuangan publik dan implementasi kontrol internal berhubungan langsung dengan kinerja *value for money* pada organisasi pemerintah daerah, dengan kontrol internal menjadi faktor yang paling kuat. Waci et al. (2024) memperlihatkan bahwa praktik pengadaan yang baik meningkatkan *value for money* pada korporasi negara di Kenya. Penelitian oleh Said et al. (2025) menekankan bahwa *budget goal clarity*, komitmen, dan partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja anggaran dalam kerangka *value for money*. Jika ditarik ke inti audit kinerja, hasil-hasil ini menegaskan bahwa audit berbasis kinerja memiliki posisi strategis dalam menilai apakah organisasi publik memakai sumber daya secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Implikasi Teoretis dan Praktis

Dari sisi teoretis, sintesis ini menguatkan pandangan bahwa audit berbasis kinerja perlu dipahami sebagai bagian dari tata kelola publik yang berorientasi hasil. Berbagai literatur yang telah terpilih menunjukkan bahwa keberhasilan audit tidak cukup dijelaskan oleh standar teknis saja; faktor kelembagaan, integritas, kontrol internal, kepemimpinan, dan teknologi juga berperan besar. Dari sisi praktis, lembaga publik perlu membangun metodologi audit yang matang, memperkuat independensi auditor, dan meningkatkan kualitas tindak lanjut rekomendasi. Tanpa tiga hal ini, audit kinerja berisiko berhenti sebagai dokumen formal tanpa daya ubah yang nyata.

Keterbatasan Penelitian dan Agenda Riset Mendatang

Kajian ini memiliki dua keterbatasan utama. Pertama, jumlah artikel dibatasi pada 15 studi empiris yang paling relevan, sehingga ada kemungkinan beberapa artikel lain yang juga penting belum terakomodasi. Kedua, literatur yang tersedia masih didominasi studi kuantitatif,

sehingga pemahaman mengenai proses implementasi audit kinerja di lapangan masih membutuhkan lebih banyak studi kualitatif mendalam. Riset mendatang dapat diarahkan pada hubungan antara audit berbasis kinerja dan evaluasi program lintas sektor, pemanfaatan analitik digital dalam audit publik, serta efektivitas tindak lanjut rekomendasi audit terhadap perbaikan kebijakan dan layanan publik.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa audit berbasis kinerja telah berkembang menjadi salah satu instrumen penting dalam penguatan pengawasan sektor publik. Berdasarkan sintesis terhadap 15 artikel empiris, kajian mengenai audit berbasis kinerja cenderung meningkat dalam beberapa tahun terakhir dan bergerak ke arah yang lebih luas, tidak lagi terbatas pada pemeriksaan prosedur, tetapi juga mencakup evaluasi program, pengelolaan risiko, pengendalian internal, akuntabilitas, serta *value for money*. Hasil ini menegaskan bahwa fokus riset telah bergeser dari audit yang bersifat administratif menuju audit yang berorientasi pada hasil dan manfaat publik.

Studi ini juga memperlihatkan bahwa tema dominan dalam literatur meliputi perkembangan metodologi audit, tantangan kelembagaan, pengaruh politik, penguatan kontrol internal, pencegahan fraud, transparansi, dan efisiensi penggunaan anggaran. Dalam konteks tersebut, audit berbasis kinerja memiliki kontribusi nyata terhadap evaluasi program publik karena mampu menilai ketercapaian tujuan, efektivitas implementasi, dan kualitas pengelolaan sumber daya. Di samping itu, audit berbasis kinerja berperan penting dalam mengidentifikasi area berisiko, mendorong perbaikan tata kelola, serta memperkuat akuntabilitas organisasi publik. Dengan demikian, audit berbasis kinerja dapat dipahami sebagai pendekatan pengawasan yang strategis untuk membantu lembaga publik meningkatkan kualitas layanan, memperbaiki pengambilan keputusan, dan memastikan bahwa penggunaan anggaran benar-benar memberikan nilai yang optimal bagi masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Abdelrahim, A., & Al-Malkawi, H.-A. N. (2022). The influential factors of internal audit effectiveness: A conceptual model. *International Journal of Financial Studies*, 10(3), Article 71. <https://doi.org/10.3390/ijfs10030071>
- ANAS, M. (2023). Audit Menuju Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan. Litnus
- Andrianto, N., Sudjali, I. P., & Karunia, R. L. (2021). Assessing the development of performance audit methodology in the supreme audit institution: The case of Indonesia. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 7(1), 19–37. <https://doi.org/10.28986/jtaken.v7i1.554>
- Awalia, D., Abdullah, M. I., Furqan, A. C., & Megawati. (2024). International evidence: Supreme Audit Institution oversight and government governance roles in achieving Sustainable Development Goal 1. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 10(2), 123–142. <https://doi.org/10.28986/jtaken.v10i2.1779>
- Bonsu, A. B., Appiah, K. O., Gyimah, P., & Owusu-Afriyie, R. (2023). Public sector accountability: Do leadership practices, integrity and internal control systems matter? *IIM Ranchi Journal of Management Studies*, 2(1), 4–15. <https://doi.org/10.1108/IRJMS-02-2022-0010>
- Boufounou, P., Eriotis, N., Kounadeas, T., Argyropoulos, P., & Pouloupoulos, J. (2024). Enhancing internal control mechanisms in local government organizations: A crucial step towards mitigating corruption and ensuring economic development. *Economies*, 12(4), Article 78. <https://doi.org/10.3390/economies12040078>
- Campbell, M., McKenzie, J. E., Sowden, A., Katikireddi, S. V., Brennan, S. E., Ellis, S., Hartmann-Boyce, J., Ryan, R., Shepperd, S., Thomas, J., Welch, V., & Thomson, H. (2020). Synthesis without meta-analysis (SWiM) in systematic reviews: Reporting guideline. *BMJ*, 368, 16890. <https://doi.org/10.1136/bmj.16890>
- Caranica, C.-N., & Domnisor, A. (2022). Performance audit challenges in the public sector in Romania. *Audit Financiar*, 20(165), 172–184. <https://doi.org/10.20869/AUDITF/2022/165/006>
- Ferry, L., Radcliffe, V. S., & Steccolini, I. (2022). The future of public audit. *Financial Accountability & Management*, 38(3), 325–336. <https://doi.org/10.1111/faam.12339>
- Grossi, G., Hancu-Budui, A., & Zorio-Grima, A. (2023). New development: The shift of public sector auditing under the influence of institutional logics-The case of European Court of Auditors. *Public Money & Management*, 43(4), 378–381. <https://doi.org/10.1080/09540962.2023.2179777>
- Grossi, G., Hay, D. C., Kuruppu, C., & Neely, D. (2023). Changing the boundaries of public sector auditing. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 35(4), 417–430. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-05-2023-0079>
- Hatta, H. (2022). Model Akuntabilitas Pejabat Pembuat Komitmen (Ppk) Pada Pengadaan Barang Dan Jasa Dinas Kesehatan Dan Rumah Sakit Di Provinsi Sulawesi Selatan= Accountability Models Commitment Making Officer (Ppk) On Procurement Of Goods And Services Office Of Health And. Universitas Hasanuddin.

- Istianah, I., Sari, N. P., & Indriani, V. (2024). A systematic review of public sector audits in Indonesia. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 10(1), 33–54. <https://doi.org/10.28986/jtaken.v10i1.1544>
- Jatmiko, B., Haya, B. S., & Utami, T. (2022). Enhancing value for money performance in local government organizations: The role of public financial accountability and internal control. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 12(2), 245–259.
- Manurung, H., & Anggraeni, E. V. (2023). AKUNTANSI ORGANISASI SEKTOR PUBLIK. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 1(6), 10–20.
- Mattei, G., Grossi, G., & Guthrie, J. (2021). Exploring past, present and future trends in public sector auditing research: A literature review. *Meditari Accountancy Research*, 29(7), 94–134. <https://doi.org/10.1108/MEDAR-09-2020-1008>
- Nadirisyah, Indriani, M., & Mulyany, R. (2024). Enhancing fraud prevention and internal control: The key role of internal audit in public sector governance. *Cogent Business & Management*, 11(1), Article 2382389. <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2382389>
- Pratolo, S., Sofyani, H., & Maulidini, R. W. (2022). The roles of accountability and transparency on public trust in the village governments: The intervening role of COVID-19 handling services quality. *Cogent Business & Management*, 9(1), Article 2110648. <https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2110648>
- Ramadhan, N., & Gani, L. (2023). Implementation of public sector audit committee guidelines: A case study of the Ministry of Finance audit committee. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 8(2), 451–475. <https://doi.org/10.23887/jia.v8i2.61912>
- Rana, T., Steccolini, I., Bracci, E., & Mihret, D. G. (2022). Performance auditing in the public sector: A systematic literature review and future research avenues. *Financial Accountability & Management*, 38(3), 337–359. <https://doi.org/10.1111/faam.12312>
- Ritonga, P. (2024). Transparansi dan akuntabilitas: Peran audit dalam meningkatkan kepercayaan stakeholder. *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 13(2), 323–336. <https://doi.org/10.35906/equili.v13i2.2004>
- Said, S. N. R., Arifuddin, Kusumawati, A., & Usman, A. (2025). Does the concept of value for money increase budget performance?. *Public and Municipal Finance*, 14(1), 1–12. [https://doi.org/10.21511/pmf.14\(1\).2025.01](https://doi.org/10.21511/pmf.14(1).2025.01)
- Sari, R., & Muslim, M. (2023). Accountability and transparency in public sector accounting: A systematic review. *Amkop Management Accounting Review*, 3(2), 90–106. <https://doi.org/10.37531/amar.v3i2.1440>
- Shidqi, F., & Arfiansyah, Z. (2025). Good governance and corruption in local governments: The role of internal control and audit. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 29(1), 1–11. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol29.iss1.art1>
- Sumiyana, Hendrian, Jayasinghe, K., & Wijethilaka, C. (2023). Public sector performance auditing in a political hegemony: A case study of Indonesia. *Financial Accountability & Management*, 39(4), 691–714. <https://doi.org/10.1111/faam.12296>
- Volodina, T., & Grossi, G. (2025). Digital transformation in public sector auditing: Between hope and fear. *Public Management Review*, 27(5), 1444–1468. <https://doi.org/10.1080/14719037.2024.2402346>

- Waci, J. M., Kariuki, P. W., & Mwirigi, P. M. (2024). Procurement practices and value for money in state corporations in Kenya. *PLOS ONE*, 19(6), e0303879. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0303879>
- Wonar, K., Masdianah, M., Siahay, A. Z. D., Pangayow, B. J. C., Salle, H. T., & Bleskadit, N. H. (2024). The effect of transparency, accountability, and the concept of value for money on public sector financial management at the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKD) Papua Province. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 7(4), 7508–7516. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i4.9868>
- Suwari, W., Das, N. A., & Putri, R. D. (2022). Pengaruh partisipasi masyarakat dan akuntabilitas pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dana desa: Studi empiris di Nagari Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok. *Cemerlang: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis*, 2(3), 205–225. <https://doi.org/10.55606/cemerlang.v2i3.317>
- Bejo, C. R., Wahyuni, L., & Maison, W. (2022). Pengaruh good governance dan pemahaman akuntansi serta pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja organisasi perangkat daerah di Kabupaten Tanah Datar. *Cemerlang: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis*, 2(3), 185–204. <https://doi.org/10.55606/cemerlang.v2i3.316>
- Nur, A., Utami, A. S., Ramadhan, F. M., & Koban, T. P. A. L. (2024). Dinamika partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Gresik periode 2024. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen*, 3(1), 106–113. <https://doi.org/10.59024/jise.v3i1.1052>
- Arwani, A., & Priyadi, U. (2024). Eksplorasi peran teknologi blockchain dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam keuangan Islam: Tinjauan sistematis. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen*, 2(2), 23–37. <https://doi.org/10.59024/jise.v2i2.653>
- Rodiah, S., Fitriani, A., Ramadani, N. F., Hasibuan, S. A., & Wijaya, M. (2024). Kajian literature: Pengaruh independensi, profesionalisme, dan akuntabilitas auditor terhadap kualitas audit. *Cemerlang: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis*, 4(1), 309–317. <https://doi.org/10.55606/cemerlang.v4i1.2542>